

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengendalian Intern .....	6
1. Pengertian Pengendalian Intern.....	6
2. Tujuan Pengendalian Intern.....	7
2.2 Pengertian Sistem Pengendalian Intern .....	7
1. Definisi Sistem Pengendalian Intern .....	7
2. Peran Penting Sistem Pengendalian Intern .....	8
3. Unsur-unsur Pengendalian Intern .....	9
4. Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern .....	10
2.3 Penerimaan Kas .....	11
2.4 Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas dari Pendapatan asli daerah .....	11
1. Pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan	12
2. Pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan Pembantu .....	16
3. Pendapatan daerah melalui bank pemerintah yang Yang ditunjuk, Bank lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos .....	21
2.5 Akuntansi Pemerintah.....	27
2.6 Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	30

	3.3 Sumber Data .....	30
	3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	30
	3.5 Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1 Gambaran Umum .....	32
	1. Sejarah Singkat .....	32
	2. Visi dan Misi .....	35
	3. Struktur Organisasi .....	36
	4. JobDescription .....	37
	4.2 Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan Logam .....	40
	1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi .....	40
	2. Tahapan Proses Perizinan Usaha Pertambangan ..	41
	3. Jangka waktu izin usaha .....	41
	4.3 Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Pertambangan .....	42
	1. Persyaratan Administrasi .....	42
	2. Persyaratan Teknis .....	42
	3. Persyaratan Lingkungan .....	43
	4. Persyaratan Finansial .....	43
	4.4 Penetapan Jenis Tarif dan Pengelolaan Penerimaan – Negara Bukan Pajak .....	43
	4.5 Prosedur Kegiatan Penerimaan Kas .....	45
	1. Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Pertambangan .....	45
	2. Prosedur Penerimaan Kas .....	46
	4.6 Hasil Analisis .....	48
	1. Analisis Unsur Pengendalian Intern .....	48
	2. Analisis Aktivitas Kegiatan Dinas ESDM .....	50
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1 Kesimpulan .....	52
	5.2 Rekomendasi .....	52

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum semua entitas atau perusahaan swasta menjalankan kegiatan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan juga untuk mendapatkan keuntungan (*Profit*), agar dapat menjalankan usaha tersebut secara berkelanjutan dan bisa terus berkembang. Sedikit berbeda dengan instansi pemerintah yang pada umumnya menyediakan pelayanan jasa bagi masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sumber daya alam maupun sumber daya mineral merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. sumber daya alam maupun sumber daya mineral juga memiliki nilai yang cukup tinggi hal tersebut dikarenakan baik dari segi perolehannya yang cukup sulit juga jumlahnya yang sangat terbatas.

Seiring dengan berjalanya waktu dan perkembangan dunia dewasa ini membuat sumber daya alam maupun sumber daya mineral menjadi lebih menipis, hal tersebut dikarenakan beberapa perusahaan berskala besar yang bergerak dibidang pertambangan yang kegiatan utamanya mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya tersebut. Didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dapat membuat beberapa perusahaan besar mengeksploitasi sumber daya alam melebihi perkiraan yang ada.

Namun tidak semudah itu karena, dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam tentunya sudah memiliki perencanaan yang matang baik dari segi perolehan waktu maupun dari segi kesehatan lingkungan. Perolehan waktu dalam hal ini adalah berapa lama waktu yang akan di pakai dalam mencapai target yang telah ditentukan karena jika tidak maka perusahaan tersebut akan mendapatkan kerugian, dan dari segi kesehatan lingkungan adalah proses pengolahan limbah yang jelas oleh pihak perusahaan karena jika tidak maka akan berakhir dengan pemberhentian kegiatan operasi dari perusahaan tersebut.

Instansi pemerintah merupakan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di buat untuk menyediakan pelayanan terhadap masyarakat sesuai aturan perundang-undangan yang telah di tetapkan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu SKPD yang terbagi ke dalam beberapa bidang, dan setiap bidang mempunyai tugasnya masing – masing. Dari beberapa bidang tersebut ada salah satu bidang

yaitu bidang pertambangan umum yang tugasnya mengatur dan mengelola segala hal yang bersangkutan dengan sumber daya mineral, seperti mineral batu bara, panas bumi, dan air tanah.

Berdasarkan uu no 28 tahun 2014 yang mengatur tentang segala pelayanan mengenai pertambangan terpusat ke provinsi tidak lagi ke kabupaten/kota. Maka Setiap perusahaan yang ingin menjalankan usaha pertambangan tentunya harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin usaha pertambangan hanya bisa dikeluarkan oleh Dinas ESDM di mana tempat perusahaan pertambangan itu berada.

Dalam memulai kegiatan operasional, setiap perusahaan pertambangan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Pertama, perusahaan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), kedua perusahaan pertambangan memiliki kejelasan pengelolaan limbah, ketiga perusahaan pertambangan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar di mana perusahaan itu berada, dan beberapa persyaratan lainnya.

Kegiatan-kegiatan pembayaran atas suatu aktivitas sebagian besar di dominasi dengan menggunakan kas. Ini tak lepas dari kondisi masa kini yang menjadikan uang tunai sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Sangat jarang ditemukan dalam sistem perekonomian sebuah Negara saat ini yang tidak menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran.

Uang tunai atau sering disebut dengan kas merupakan komponen penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagian besar aktivitas pada suatu entitas, baik entitas bisnis ataupun entitas pemerintahan, selalu melibatkan uang tunai dalam pelaksanaan kegiatannya. Hampir dapat dipastikan bahwa kas inilah yang memiliki peranan sentral dalam menjaga kelangsungan sebuah aktivitas.

Pengendalian intern merupakan kegiatan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas entitas bisnis maupun entitas pemerintah agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena kas daerah adalah salah satu komponen dari aktiva yang sangat vital bagi kelangsungan hidup entitas pemerintah daerah, dimana kas daerah merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek operasional pemerintah daerah maka diperlukan pengendalian intern.

Pengendalian intern dapat dilakukan dengan adanya penyusunan sistem pengendalian intern yang telah dibuat untuk digunakan dalam kegiatan aktivitas atau operasional entitas pemerintah. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Hal yang mendasari perlunya sistem pengendalian intern kas terhadap kas daerah adalah bahwa kas daerah merupakan asset lancar yang sensitive terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Baik entitas bisnis atau entitas pemerintah, kas adalah salah satu aktiva yang siap untuk diubah menjadi jenis asset yang lain, sangat mudah disembunyikan dan dipindahkan, serta sangat diinginkan. Oleh karena karakteristik ini maka kas adalah aktiva yang paling rawan terhadap pencurian dan penyalagunaan.

Dalam menjalankan kegiatan pertambangan, pihak perusahaan akan dikenakan tarif berupa iuran tetap (*landrent*) dan iuran produksi (*royalty*) yang nantinya akan menjadi penerimaan kas daerah. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi masalah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara adalah didapati ada beberapa perusahaan pertambangan terlambat melaporkan bukti pembayaran. Sehingga menurut penulis dengan adanya sistem pengendalian intern kas yang baik, diharapkan penerimaan kas daerah dapat dilakukan secara tepat, aman, terkendali, transparan, dan dapat menghindari kecurangan yang mungkin saja dapat terjadi. Manfaat sistem pengendalian intern bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kas daerah adalah untuk mengamankan harta pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mempelajarinya dan sekaligus menjadi acuan dalam melakukan penulisan tugas akhir ini, dengan memilih judul “Sistem Pengendalian Intern terhadap Penerimaan Kas Izin Usaha Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup sistem pengendalian intern terhadap penerimaan kas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan tugas akhir ini dengan membahas permasalahan Sistem Pengendalian Intern terhadap Penerimaan Kas Negara Bukan Pajak atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah Apakah sistem pengendalian intern terhadap penerimaan kas izin usaha pertambangan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi utara ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem pengendalian intern terhadap penerimaan kas izin usaha pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi institusi

Di harapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap kurikulum yang ada serta menambah pengetahuan tentang sistem pengendalian intern dan penerimaan kas.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan yang lebi baik mengenai pengendalian intern penerimaan izin usaha pertambangan.

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku kuliah dan dapat diaplikasikan ke dalam pengetahuan praktis di lapangan.